

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 02 PURWOREJO

Hodin

(SMP Negeri 15 Purworejo)
miftahodin.2303@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi, dan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan: (1) Otonomi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Purworejo dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (2) Partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu sekolah selalu melibatkan komite sekolah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan, komite sekolah pun berperan aktif dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. (3) Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat efektif dalam mengelola sarana prasarana yang ada dan bila ada yang kurang lengkap segera berusaha melengkapi agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. (4) Tim kerja sekolah melaksanakan tugas sebagai tim pengembang sekolah yaitu dengan memberikan masukan kepada sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru, membuat perencanaan pengembangan sekolah dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Kata kunci: *Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut sekolah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Dengan menganut sistem sentralisasi tersebut pendidikan di Indonesia dinilai sangat kaku dan sentralistik. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Faktor-faktor penyebab kurang berhasilnya upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented* dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat."⁷⁹ Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi

⁷⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 48.

desentralisasi di bidang pendidikan. Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Kelahiran UU. No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakhiri era sentralisasi, dan kini telah lahir era desentralisasi dan otonomi daerah. Satuan pendidikan sekolah yang dalam era sentralisasi sering disebut sebagai sebuah institusi yang berada pada level paling bawah yang mengurus dunia pendidikan untuk anak-anak bangsa. Kini satuan pendidikan sekolah harus dapat bertanggung jawab untuk dapat mengurus dirinya sendiri, melalui mekanisme yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS).⁸⁰

Tujuan pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah di seluruh jenjang pendidikan. Maka dari itu, semua urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat diserahkan langsung kepada sekolah itu sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya banyak sekolah yang mengalami kendala dalam melaksanakan manajemen sekolah. Hal tersebut menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan mutu. Seperti yang diungkapkan Sallis yang dikutip oleh Husaini Usman, ia mengemukakan bahwa: "Sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga sekolah hanyalah pelaksanaan belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya. Pendapat Sallis ini mendukung pendapat Juran, salah seorang begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu, 85% oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya."⁸¹

Salah satu permasalahan utama rendahnya mutu pendidikan disebabkan kurang terampilnya sekolah dalam mengelola manajemen sekolahnya, baik itu mengelola tenaga SDM nya, kurikulum, sarana dan prasarana maupun mengelola pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari memperbaiki system manajemen sekolah. Salah satu cara untuk memperbaiki buruknya system manajemen sekolah yaitu dengan mengimplementasikan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

⁸⁰ Suparlan *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 3.

⁸¹ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 622-623.

MBS merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah."⁸² Pergeseran dari manajemen berbasis pusat (sentralistik) menuju manajemen berbasis sekolah memerlukan peninjauan kembali terhadap aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan bertindak, dan hubungan antar unsur-unsur sekolah. Aturan sekolah perlu dirumuskan kembali agar sesuai dengan tuntutan manajemen berbasis sekolah yaitu otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi.⁸³

Manajemen Berbasis sekolah (MBS) adalah salah satu model reformasi birokrasi sebagai konsekuensi desentralisasi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan suatu bentuk sekolah masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Beberapa definisi tentang MBS menegaskan bahwa konsep tersebut mengacu pada manajemen sumber daya di tingkat sekolah dan bukan di suatu sistem atau tingkat yang sentralistik. Beberapa sumber daya dalam pengertian lebih luas telah didefinisikan mencakup pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan.⁸⁴

Salah satu ciri terpenting dari penerapan MBS adalah bagaimana pihak sekolah mampu menyediakan layanan pendidikan yang memuaskan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya sampai dimana kesiapan dan peran masyarakat dan orang tua peserta didik dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan meningkatkan sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan MBS di sekolah memerlukan kesiapan berbagai komponen dan perangkat stakeholder pendidikan baik secara internal maupun eksternal yang dapat mendukung pelaksanaan penerapan MBS itu sendiri antara lain: gedung sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran, kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, lingkungan sekolah, peran serta orang tua peserta didik, dukungan masyarakat dan dunia usaha lainnya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi

⁸² *Ibid*, hal. 623.

⁸³ Ibrahim, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. (*Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2015), hal. 118.

⁸⁴ Ibtisan Abu Duhou, *School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 25.

bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.⁸⁵

Implementasi MBS diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Selain itu, partisipasi orangtua maupun masyarakat sekitar juga harus terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan manajemen sekolah. Jika kegiatan manajemen sekolah berjalan dengan baik secara terus menerus tentu akan berdampak positif bagi warga sekolah dan juga meningkatnya mutu pendidikan di sekolah.

SMP Negeri 02 Purworejo mulai menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tahun 2006. Tujuan mengimplementasikan MBS tentunya untuk mengembangkan sekolah atau meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kondisi sekolah dengan mengoptimalkannya melalui kekuatan atau kelebihan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu sekolah/madrasah harus ditunjang oleh berbagai perangkat, sistem, dan strategi pengelolaannya, salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan manajemen pendidikan. Manajemen adalah suatu proses kegiatan dan perangkat yang mengarahkan dan menuntun semua usaha dan upaya suatu organisasi di dalam mencapai suatu tujuan. Seperti diketahui bahwa tugas manajemen antara lain ialah mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin.⁸⁶

Manajemen Pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha pendidikan dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁸⁷

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.⁸⁸

Dengan adanya MBS, SMP Negeri 02 Purworejo ingin menciptakan suasana dan kondisi sekolah yang mandiri, transparan, akuntabel, dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat baik secara internal dan eksternal. Dalam hal ini, sekolah memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Kendatipun MBS telah

⁸⁵ Masduki Duryat, *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 110.

⁸⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 177.

⁸⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 87-88.

⁸⁸ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 3.

diterapkan di sekolah, namun kenyataannya belumberjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapahambatan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Adapunhambatannya yakni keterbatasan waktu *stakeholders* meliputi warga sekolah, komite dan masyarakat dalam mensosialisasikan program-program sekolah. Kemudian partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat (komite sekolah) belum sepenuhnya berperan aktif untuk ikut dalam melaksanakan programsekolah. Kendala lainnya yakni lemahnya pemahaman warga sekolah (guru dan karyawan) dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS yang menekankan pada aspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan, transparansi dan akuntabilitassekolah, kemudian kurang konsistensinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tupoksi, yang akan mengakibatkan kurangoptimalnya pelaksanaan kegiatan program sekolah.

Di sisi lain terdapat dampak positif dari implementasi MBS yang sudah dilaksanakan oleh sekolah yaitu banyaknya prestasi yang diraih sekolah baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Selain itu, banyak juga lulusan-lulusan (*output*) yang diterima dan mampu bersaing di sekolah tingkat atasnya.

Penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah diperlukan kinerja dalam menata efektivitas pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, maka manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam menata efektivitas pembelajaran secara profesional dengan jalan meningkatkan efektivitas para pendidik dan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran yang lebih bertanggung jawab, sehingga mutu pendidikan dapat dirasakan peserta didik, begitu pula pihak pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan meningkatkan etos kerja dan profesionalisme yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo diberikan keleluasaan untuk menata proses pembelajaran dengan konsep otonomi sekolah (kemandirian sekolah) yang menjamin siswa mendapatkan pelayanan pembelajaran yang bermutu dengan memperbaiki dan mengembangkankinerja kepemimpinan sekolah, mutu mengajar guru, fasilitas sekolah, program-program sekolah, dan layanan lainnya.

Sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan program-program kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya menambah jam mata pelajaran yang ingin ditingkatkan kadar dan mutu pembelajarannya, memperkaya pokok atau subpokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan konteks kebutuhan anak disekolah itu, memberi perhatian khusus pada pengembangan bakat dan minat para peserta didik. Di samping itu, terbuka kemungkinan untuk mengembangkan mata pelajaran yang efektif, menetapkan sumber pelajaran, fasilitas dan alat-alat pelajaran yang diperlukan. Untuk mendukung terlaksananya

penerapan manajemen berbasis sekolah, diperlukan adanya kerja sama (kemitraan) dengan masyarakat melalui dewan komite sekolah dengan melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan seperti kelompok Orang Tua, kelompok Asosiasi, kelompok Praktisi, kelompok Akademisi, kelompok pengusaha, Tokoh masyarakat dan sebagainya.

Keberadaan mereka sangat diperlukan agar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan partisipasi. Kerja sama yang dimaksud adalah dalam bentuk kontribusi pembiayaan dan dalam bentuk kontribusi pemikiran/tenaga. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran ikut berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian program sekolah, menyusun RAPBS sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. SMP Negeri 02 Purworejo telah memiliki gedung sekolah yang sudah memadai, lingkungan sekolah sangat kondusif, termasuk fasilitas sarana dan prasarana pendukung lainnya yakni lokasi sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, pelaksanaan proses pembelajaran, sarana dan media pembelajaran, tenaga administrasi, dukungan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan sarana prasarana pendukung lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 02 Purworejo.

Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam menerapkan manajemen berbasis pengelolaan sekolah serta cara mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi pemberdayaan SMP Negeri 02 Purworejo sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Dengan mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah), adanya hubungan kemitraan yang kuat antar *stakeholders* dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP N 02 Purworejo”.

KAJIAN LITERATUR

1. Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemah dari “*School based management*”. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Menengah.

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Dirjen Dikdasmen, bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam

rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relative tinggi, dalam rangka Kebijakan Pendidikan Nasional.⁸⁹

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.⁹⁰

Mulyasa juga memberikan penjelasan MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.⁹¹ Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah serta pelibatan komite dan adanya respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud dari reformasi pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta menjamin yang bertumpu ditingkat sekolah. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya control pemerintah pusat dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi.

⁸⁹ Dirjen Dikdasmen, *Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hal. 2.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hal. 2.

⁹¹ Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 24.

MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan antara yang satu dengan yang lain. Menurut Bellen, dkk., Manajemen Berbasis Sekolah dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu penyelenggaraan sekolah, kinerja kepalasekolah, dan peran serta masyarakat.⁹²

Karakteristik MBS bisa diketahui juga antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi.⁹³

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkan kembangkan suasana yang kondusif.⁹⁴ Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek tujuan MBS yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Secara teoritis dan aplikasi praksis, bahwa dalam konteks MBS, keberhasilan pendidikan harus didefinisikan ulang, bukan semata-mata pada ukuran standar prestasi siswa. Keberhasilan harus berada dalam konsep yang lebih luas, diantaranya mencakup hal sebagai berikut: pola keterampilan berpikir yang lebih baik, pemahaman dan penghargaan pada multi budaya, menurunnya tingkat putus sekolah (*drop out*), pelayanan kepada masyarakat, terbukanya berbagai pilihan (mata pelajaran), partisipasi di dalam kelas matematika dan IPA yang lebih tinggi, pilihan dan kesuksesan pasca pendidikan menengah, dimilikinya konsep pribadi siswa dan kreativitas serta keindahan dalam seni. Namun, apa pun kriteria keberhasilan tersebut, pencapaiannya tergantung pada kualitas program pendidikan dan pelayanan yang diberikan. Karena itu, ukuran keberhasilan implementasi MBS di Indonesia dapat dinilai setidaknya dari beberapa kriteria di bawah ini:

⁹² Bellen, S., dkk, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdikbud, 1999), hal. 11-12.

⁹³ Udin Syarifudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 29.

⁹⁴ Mulyasa, E., *Op.Cit.*, hal. 25.

Pertama, MBS dianggap berhasil apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. *Kedua*, MBS dianggap berhasil apabila kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik. *Ketiga*, tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. *Keempat*, karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik. *Kelima*, terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukuk rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. *Keenam*, semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah baik yang menyangkut keputusan intruksional maupun organisasional. *Ketujuh*, salah satu indikator penting lain kesuksesan MBS adalah semakin baiknya iklim dan budaya kerja sekolah. *Kedelapan*, kesejahteraan guru dan staf seolah membaik antara lain karena sumbangan pemikiran, tenaga dan dukungan dana dari masyarakat luas. *Kesembilan*, apabila semua kemajuan pendidikan di atas telah tercapai maka dampak selanjutnya adalah akan terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Mutu Pendidikan

Berbicara tentang mutu berarti berbicara tentang sesuatu bisa berupa barang atau jasa. Barang yang bermutu adalah yang sangat bernilai bagi seseorang yang biasanya berhubungan dengan kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebenaran (*truth*), dan idealitas. Sedangkan jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, tidak ada keluhan.⁹⁵

Menurut Crosby, mutu adalah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan (*conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya, maupun outputnya.⁹⁶ Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan madrasah dituntut untuk memiliki bakustandar mutu pendidikan. Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan pengeluaran, baik layanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasarnya). Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu kepuasan pelanggan sepenuhnya

⁹⁵ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 304.

⁹⁶ Hadis & Nurhayati, Hadis & Nurhayati, 2012, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 85.

(*full customersatisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapatmemberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen.

Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan madrasah bermutu adalah madrasah yang dapat memuaskan pelangganya, baikpelanggan internal maupun eksternal.Mutu menurut Carvin, sebagaimana dikutip Nasution, adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/ tenagakerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihiharapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan pelanggan pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk harusberubah atau disesuaikan. Dengan perubahan mutu produk tersebutdiperlukan perubahan atau penigkatan-peningkatan ketrampilan tenagakerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahanlingkungan organisasi agar produk memenuhi atau melebihi harapanpelanggan.⁹⁷ Gronroos menunjukkan tiga kriteria pokok dalam menilai kualitasjasa, yaitu *outcome related*, *process related*, dan *image related criteria*.⁹⁸ Dari ketiga kriteria itu dideskripsikanenam unsur karakteristik jasa yang bermutu:

Pertama, profesionalisme dan keahlian, merupakan kriteria utama,yang membuat pelanggan percaya bahwa sumber daya manusia penyediajasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpunisekaligus dapat mengha-silkan produk yang bermutu.*Kedua*, sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasadalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siapmembantu pelanggan.

Ketiga, *accessibility and flexibility*, yaknisebuah proses yang dirancang secara fleksibel untuk memberikankemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses.*Keempat*, *reliability and thruthworthness*, yaitu reputasi yang baikdan selalu menjaga kepercayaan pelanggan menjadikan pelangganyakin dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah sebuahpelayanan yang bermutu.

Kelima, *recovery*, bila terjadi kesalahan atau keluhan,pelanggan tidak akan cemas karena mereka percaya penyedia jasa dapatmenemukan pemecahan masalahnya.*Keenam*, *reputationand credibility*, yaitu kesan yang dirancang oleh penyedia jasa adalahmenjaga reputasi dan loyalitas pelanggan.Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwapengertian mutu mengandung tiga unsur, yaitu: a) kesesuaian denganstandar, b) kesesuaian dengan harapan stakeholders, c) pemenuhan janjiyang diberikan.

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut:

⁹⁷ Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2001), hal. 16.

⁹⁸ Engkoswara, *Op.Cit.*, hal. 305.

- a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
- b. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidaksiapan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- c. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan loncat-loncat. Norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjasama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
- d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengasa, dan pimpinan kantor diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
- e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah dan mengembangkan program baru.
- f. Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
- g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakainya secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
- h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri

darikebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapatdicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.⁹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah manusia dan sosial. Waktu penelitian adalah antara 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Juli 2019, dan tempat penelitian adalah di SMP Negeri 02 Purworejo.

Subjek dan informan penelitian ini yaitu orang-orang yang berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, siswa, wali siswa, komite sekolah, dan alumni SMP Negeri 02 Purworejo.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Itu artinya melakukan validasi, dengan cara mengecek dokumen program dan bukti tertulis lainnya.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi metode yaitu menggunakan dua strategi yaitu: (1) Pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa tehnik pengumpulan data; (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis lakukan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).¹⁰¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo

Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki kurikulum, menambah buku pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. Mutu pendidikan itu merupakan persoalan mikro pendidikan yang terkait dengan persoalan kemampuan guru, kesiapan sekolah dalam mendukung proses belajar dengan menyediakan

⁹⁹ Nana Syaodih Sukamdinata, *Pengembangan kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 8.

¹⁰⁰ Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 280.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 254.

fasilitas yang diperlukan, dan partisipasi masyarakat pendukung pendidikan yang ada di wilayahnya disertai penataan manajemen.¹⁰²

Penyelenggaraan otonomi sekolah sebagai langkah esensial dari otonomi daerah; dan telah diterapkan suatu terobosan kebijaksanaan untuk otonomi pendidikan yang disebut manajemen berbasis sekolah (*school based management*). Dengan otonomi sekolah, dapat lebih dioptimalkan peran sekolah dan menghargai kebutuhan nyata di setiap sekolah. Pemerintah sekarang telah berkomitmen, bahwa pendidikan berkualitas hanya akan nyata terwujud, bila otonomi daerah berujung pada otonomi sekolah yang berbasiskan manajemen (*School Based Management*).¹⁰³

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.¹⁰⁴

MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah serta pelibatan komite dan adanya respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka otonomi sekolah SMP N 02 Purworejo dalam meningkatkan mutu pendidikan telah mengambil kebijakan:

- a. Sekolah telah dapat menyusun dan menetapkan sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah.
- b. Sekolah memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, sekolah secara bertanggung jawab harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan persyaratan lain yang terkait.

¹⁰² Suryadi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Sarana Panca Karya Nusa, 2002).

¹⁰³ Depdikbud, *Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Dikmenum, 2002).

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hal. 2.

- c. Sekolah telah menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya.
- d. Sekolah telah mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada.
- e. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

2. Partisipasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo

Pengelolaan sumber daya sekolah melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan akan memberi ruang gerak yang cukup bagi sekolah untuk memberi layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan konteks sekolah itu sendiri. Melalui pemberian ruang gerak yang cukup, diharapkan sekolah akan muncul kreativitas, inovasi, tanggung jawab, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sekolah. Konsekuensinya, maka dalam jangka panjang Manajemen Berbasis Sekolah akan mendorong timbulnya ciri-ciri khusus sekolah, sesuai dengan potensi setempat.

Di daerah yang memiliki potensi kesenian sangat mungkin akan muncul sekolah yang memiliki keunggulan di bidang kesenian. Sekolah lain mungkin akan tumbuh dengan ciri khas bidang matematika, agama, olahraga dan sebagainya. Dalam jangka panjang keunggulan yang bervariasi ini yang akan menjadi awal kebanggaan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu dalam Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah harus diberi ruang gerak cukup dalam menjabarkan kurikulum. Dengan cara itu, setiap sekolah memiliki peluang untuk menjadi “sekolah unggul”, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jika sekolah bersedia mengikutsertakan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan untuk berencana, pelaksanaan dan pengendalian program berarti sekolah tersebut menggunakan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif akan mendorong peran serta masyarakat lebih besar terhadap sekolah.

Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah. Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi pemda.

Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf pemda.

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua.

Menurut Cheng (dalam Nurkolis), ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orangtua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. *Pertama*, pendekatan *school based* dengan cara mengajar orangtua siswa datang kesekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru orangtua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. *Kedua*, pendekatan *home based*, yaitu orangtua membantu anaknya belajar dirumah dan guru berkunjung ke rumah. Sedangkan, peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil data yang penulis temukan di lapangan bahwa partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 02 Purworejo sangat berperan penting. Masyarakat tersebut masuk dalam organisasi komite sekolah. SMP N 02 Purworejo dalam meningkatkan mutu pendidikan dan atau pengambilan pengambilan keputusan selalu melibatkan dan meminta peran serta komite sekolah. Hal ini karena SMP N 02 Purworejo tidak dapat melakukan peningkatan mutu tanpa adanya daya dukung dari masyarakat. Di tangan Komite Sekolah inilah menjadi jalur yang menjembatani antara keinginan dan kebutuhan pihak sekolah ke masyarakat ataupun sebaliknya. Dengan adanya komite sekolah inilah salah satu penunjang keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3. Kepemimpinan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah berkaitan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan antar manusia. Maka syarat yang harus dipenuhi seseorang yang dipilih atau diangkat menjadi kepala

¹⁰⁵ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004).

sekolah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan kemampuan dalam membina hubungan baik dengan semua personel sekolah. Berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan meliputi proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi/lembaga pendidikan terutama untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan membimbing, menggerakkan serta mendorong dan mengarahkan orang-orang yang ada dalam lembaga pendidikan, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 02 Purworejo tidak hanya memfokuskan pada pengelolaan peserta didik saja, namun kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah seperti tenaga pendidik, peserta didik, staff dan komite sekolah juga dikelola dengan sebaik-baiknya bahkan pendataan mengenai sarana prasarana sekolah pun sangat diperhatikan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer kepala sekolah SMP N 02 Purworejo memperhatikan kualitas siswa dimana sekolah memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan optimal seperti tersedianya sarana prasarana pembelajaran, Untuk meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah SMP N 02 Purworejo sering mengirim guru untuk melakukan pelatihan pembuatan media pembelajaran, seminar pembelajaran, workshop, bahkan membuat karya ilmiah. Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo. Kepala sekolah melakukan peran supervisor dalam tiga tahapan yaitu melakukan persiapan, proses dan tindak lanjut supervisi. Pelaksanaan supervisi pembelajaran dilakukan dua kali dalam satu semester dengan teknik supervisi yang digunakan adalah observasi kelas.

4. Kerja Tim Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo

Pengetian Tim Kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu disuatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Pekerja tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual.

Kerja tim adalah suatu kelompok yang upaya-upaya anggotanya menghasilkan kinerja yang lebih besar dari kontribusi para anggota kelompok, didalamnya ada sinergi positif yang meningkatkan kinerja dan kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah kontribusi para anggotanya.

Dalam sekolah yang menerapkan TQM, sekolah harus memahami akan fungsi tim yang di bentuk. Sebagai contoh adalah tim yang dibentuk untuk penyusunan mata pelajaran. Tim ini dibentuk agar memiliki fungsi penting yang mencakup:

- a. Bertanggung jawab pada mutu pembelajaran
- b. Bertanggung jawab pada pemanfaatan waktu para guru, material, serta ruang yang dimanfaatkan.
- c. Menjadi sarana untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu.
- d. Bertindak sebagai penyalur informasi kepada pihak manajemen tentang perubahan-perubahan yang diperlukan dalam proses peningkatan mutu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5. Otonomi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Purworejo dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sekolah telah dapat menyusun dan menetapkan sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, melengkapi sarana prasarana pendidikan dan merancang proses pembelajaran yang PAKEM.
6. Partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bahwa sekolah selalu melibatkan komite sekolah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan, komite sekolah pun berperanaktif dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.
7. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat efektif dalam mengelola sarana prasarana yang ada dan bila ada yang kurang lengkap segera berusaha melengkapi agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Kepala sekolah menggerakkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah seperti tenaga pendidik, peserta didik, staf dan komite sekolah untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya dan peningkatan.
8. Tim kerja sekolah melaksanakan tugas sebagai tim pengembang sekolah yaitu memberikan masukan kepada sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru, membuat perencanaan pengembangan sekolah dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellen, S, dkk, 1999, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Agama RI, 2002, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdikbud, 2002, *Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dikmenum.
- Dirjen Dikdsamen, 2001, *Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Engkoswara & AanKomariah, 2010, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadis & Nurhayati, 2012, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Husaini Usman, 2010, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi Ketiga*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, 2015, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 Nomor 1, hal.118.
- Ibtisam Abu-Duhou, 2002, *School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Masduki Duryat, 2016, *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E., 2011, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Pengembangan kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. N., 2001, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Ghalia Indoensia.
- Nurkolis, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn, 2006, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saud, Udin Syaefudin, 2001, *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Minarti, 2011, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, 2013, *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadi, 2002, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Syaiful Sagala, 2010, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: UPI Bandung.